



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
Email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

## PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.1472/AJ.402/DRJD/2017

TENTANG

TATA CARA PENOMORAN NOMOR UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TATA CARA PENOMORAN NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

3. Nomor Uji Berkala adalah nomor registrasi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah jenis Kendaraan Bermotor yang wajib melakukan uji berkala, antara lain: Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
6. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
9. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
11. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala Kendaraan Bermotor.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Dinas Provinsi adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah Provinsi.
14. Dinas Kota/Kabupaten adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wilayah Kota/Kabupaten.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi :

- a. kriteria pemberian nomor uji berkala kendaraan bermotor;
- b. kode nomor uji berkala Kendaraan Bermotor; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 3

- (1) Uji Berkala wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang pertama kali.
- (5) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran;
  - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis Kendaraan Wajib Uji;
  - c. pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen;
  - d. pemberian nomor uji kendaraan bermotor; dan
  - e. pembuatan kartu induk uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipungut biaya.

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diajukan oleh pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan membawa Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang didaftarkan dan menunjukkan dokumen asli.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilengkapi persyaratan meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang didaftarkan;
  - b. salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
  - c. salinan/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan
  - d. salinan/fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilengkapi persyaratan meliputi:
  - a. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang didaftarkan;
  - b. salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Wajib Uji; dan
  - c. salinan/fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (4) Kendaraan Wajib Uji yang telah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dalam *database* Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (6) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB III

#### KODE NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 5

- (1) Kode nomor uji berkala Kendaraan Bermotor berupa alfanumerik paling sedikit 13 (tiga belas) buah, dengan susunan:
  - a. 2 (dua) huruf menunjukkan kode provinsi;
  - b. 2 (dua) angka menunjukkan kode kota/kabupaten;
  - c. 1 (satu) huruf menunjukkan jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala;
  - d. 2 (dua) angka menunjukkan kode tahun pendaftaran uji berkala, yang terdiri dari 2 (dua) angka terakhir; dan
  - e. 6 (enam) angka menunjukkan nomor urut pengujian.
- (2) Kode provinsi dan kode kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Huruf yang menunjukkan jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. A untuk Mobil Penumpang umum;
  - b. B untuk Mobil Bus;
  - c. C untuk Mobil Barang;

- d. D untuk kendaraan khusus;
  - e. E untuk Kereta Gandengan;
  - f. F untuk Kereta Tempelan;
  - g. G untuk mobil penarik (*tractor head*); dan
  - h. H untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- (4) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak *emboss* pada plat berbahan aluminium dan ditempel menggunakan *adhesive* yang kuat tidak mudah lepas pada rangka dan/atau ruang mesin Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan mudah dilihat serta dibaca.
- (5) Kode nomor uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dan berlaku selama Kendaraan Bermotor tersebut sebagai Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
- (6) Bentuk dan ukuran kode nomor uji berkala Kendaraan Bermotor serta contoh penulisan nomor uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

Direktur Jenderal/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kepala Dinas Perhubungan Kota/Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka penomoran nomor uji berkala Kendaraan Bermotor yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang Kendaraan Bermotor tersebut sebagai Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala.
- (2) Penomoran nomor uji berkala Kendaraan Bermotor wajib disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.64/AJ.402/DRJD/2002 tanggal 4 Februari 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

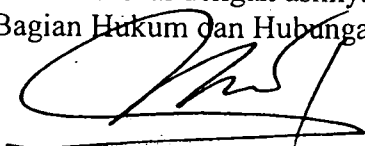
Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 30 Maret 2017

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

Ttd

**Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.**  
**Pembina Utama (IV/e)**  
**NIP. 19590824 201603 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat



**NASUTION BIN AS**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.1472/AJ.402/DRJD/2017  
Tanggal : 30 Maret 2017

### **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI**

Dengan ini menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
2. Nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe
3. Nama Pemilik
4. Alamat
5. Merek
6. Tipe
7. Jenis / Peruntukkan
8. Tahun Pembuatan
9. Isi Silinder
10. Nomor Rangka (NIK)
11. Nomor Mesin
12. Nomor Uji

Telah didaftar sebagai Kendaraan Wajib Uji Berkala, di Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor .....

Surat ini merupakan bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dan berlaku sebagai tanda lulus uji sampai diterbitkannya Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau paling lama sampai dengan tanggal .....(1 tahun terhitung sejak STNK terbit).

.....  
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta/Provinsi  
Kabupaten/Kota .....

(Nama)

.....  
(Pangkat)

(NIP)

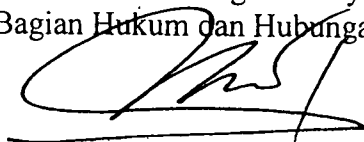
---

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

**Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19590824 201603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat



**NASUTION BIN AS**

Pembina (IV/a)

NIP. 19680223 199803 1 002



Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 Nomor : SK.1472/AJ.402/DRJD/2017  
 Tanggal : 30 Maret 2017

**KODE PROVINSI DAN KODE KABUPATEN/KOTA**

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
<b>AA</b>	<b>ACEH</b>		
AA-01			ACEH SELATAN
AA-02			ACEH TENGGARA
AA-03			ACEH TIMUR
AA-04			ACEH TENGAH
AA-05			ACEH BARAT
AA-06			ACEH BESAR
AA-07			PIDIE
AA-08			ACEH UTARA
AA-09			SIMEULUE
AA-10			ACEH SINGKIL
AA-11			BIREUEN
AA-12			ACEH BARAT DAYA
AA-13			GAYO LUES
AA-14			ACEH JAYA
AA-15			NAGAN RAYA
AA-16			ACEH TAMIANG
AA-17			BENER MERIAH
AA-18			PIDIE JAYA
AA-71		BANDA ACEH	
AA-72		SABANG	
AA-73		LHOKSEUMAWE	
AA-74		LANGSA	
AA-75		SUBULUSSALAM	
<b>AB</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>		
AB-01			TAPANULI TENGAH
AB-02			TAPANULI UTARA
AB-03			TAPANULI SELATAN
AB-04			NIAS
AB-05			LANGKAT
AB-06			KARO
AB-07			DELI SERDANG
AB-08			SIMALUNGUN
AB-09			ASAHAN
AB-10			LABUHAN BATU
AB-11			DAIRI
AB-12			TOBA SAMOSIR
AB-13			MANDAILING NATAL
AB-14			NIAS SELATAN

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
AB-15			PAKPAK BHARAT
AB-16			HUMBANG HASUNDUTAN
AB-17			SAMOSIR
AB-18			SERDANG BEDAGAI
AB-19			BATUBARA
AB-20			PADANG LAWAS UTARA
AB-21			PADANG LAWAS
AB-22			LABUHAN BATU SELATAN
AB-23			LABUHAN BATU UTARA
AB-24			NIAS UTARA
AB-25			NIAS BARAT
AB-71		MEDAN	
AB-72		PEMATANG SIANTAR	
AB-73		SIBOLGA	
AB-74		TANJUNG BALAI	
AB-75		BINJAI	
AB-76		TEBING TINGGI	
AB-77		PADANG SIDEMPUAN	
AB-78		GUNUNGSITOLI	
<b>AC</b>	<b>RIAU</b>		
AC-01			KAMPAR
AC-02			INDRAGIRI HULU
AC-03			BENGKALIS
AC-04			INDRAGIRI HILIR
AC-05			PELALAWAN
AC-06			ROKAN HULU
AC-07			ROKAN HILIR
AC-08			SIAK
AC-09			KUANTAN SINGINGI
AC-10			KEPULAUAN MERANTI
AC-71		PEKANBARU	
AC-72		DUMAI	
<b>AD</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>		
AD-01			PESISIR SELATAN
AD-02			SOLOK
AD-03			SIJUNJUNG
AD-04			TANAH DATAR
AD-05			PADANG PARIAMAN
AD-06			AGAM
AD-07			LIMA PULUH KOTA
AD-08			PASAMAN
AD-09			KEPULAUAN MENTAWAI
AD-10			DHARMASRAYA
AD-11			SOLOK SELATAN
AD-12			PASAMAN BARAT
AD-71		PADANG	
AD-72		SOLOK	
AD-73		SAWAHLUNTO	

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
AD-74		PADANG PANJANG	
AD-75		BUKITTINGGI	
AD-76		PAYAKUMBUH	
AD-77		PARIAMAN	
<b>AE</b>	<b>JAMBI</b>		
AE-01			KERINCI
AE-02			MERANGIN
AE-03			SAROLANGUN
AE-04			BATANGHARI
AE-05			MUARO JAMBI
AE-06			TANJUNG JABUNG BARAT
AE-07			TANJUNG JABUNG TIMUR
AE-08			BUNGO
AE-09			TEBO
AE-71		JAMBI	
AE-72		SUNGAI PENUH	
<b>AF</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>		
AF-01			OGAN KOMERING ULU
AF-02			OGAN KOMERING ILIR
AF-03			MUARA ENIM
AF-04			LAHAT
AF-05			MUSI RAWAS
AF-06			MUSI BANYUASIN
AF-07			BANYUASIN
AF-08			OGAN KOMERING ULU TIMUR
AF-09			OGAN KOMERING ULU SELATAN
AF-10			OGAN ILIR
AF-11			EMPAT LAWANG
AF-12			PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
AF-13			MUSI RAWAS UTARA
AF-71		PALEMBANG	
AF-72		PAGAR ALAM	
AF-73		LUBUK LINGGAU	
AF-74		PRABUMULIH	
<b>AG</b>	<b>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>		
AG-01			BANGKA
AG-02			BELITUNG
AG-03			BANGKA SELATAN
AG-04			BANGKA TENGAH
AG-05			BANGKA BARAT
AG-06			BELITUNG TIMUR
AG-71		PANGKAL PINANG	

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
<b>AH</b>	<b>BENGKULU</b>		
AH-01			BENGKULU SELATAN
AH-02			REJANG LEBONG
AH-03			BENGKULU UTARA
AH-04			KAUR
AH-05			SELUMA
AH-06			MUKOMUKO
AH-07			LEBONG
AH-08			KEPAHIANG
AH-09			BENGKULU TENGAH
AH-71		BENGKULU	
<b>AI</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>		
AI-01			BINTAN
AI-02			KARIMUN
AI-03			NATUNA
AI-04			LINGGA
AI-05			KEPULAUAN ANAMBAS
AI-71		BATAM	
AI-72		TANJUNG PINANG	
<b>AJ</b>	<b>LAMPUNG</b>		
AJ-01			LAMPUNG SELATAN
AJ-02			LAMPUNG TENGAH
AJ-03			LAMPUNG UTARA
AJ-04			LAMPUNG BARAT
AJ-05			TULANG BAWANG
AJ-06			TANGGAMUS
AJ-07			LAMPUNG TIMUR
AJ-08			WAY KANAN
AJ-09			PESAWARAN
AJ-10			PRINGSEWU
AJ-11			MESUJI
AJ-12			TULANG BAWANG BARAT
AJ-13			PESISIR BARAT
AJ-71		BANDAR LAMPUNG	
AJ-72		METRO	
<b>BA</b>	<b>DKI JAKARTA</b>		
BA-01			ADM. KEPULAUAN SERIBU
BA-71		ADM. JAKARTA PUSAT	
BA-72		ADM. JAKARTA UTARA	
BA-73		ADM. JAKARTA BARAT	
BA-74		ADM. JAKARTA SELATAN	
BA-75		ADM. JAKARTA TIMUR	
<b>BB</b>	<b>BANTEN</b>		
BB-01			PANDEGLANG
BB-02			LEBAK

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
BB-03			TANGERANG
BB-04			SERANG
BB-71		TANGERANG	
BB-72		CILEGON	
BB-73		SERANG	
BB-74		TANGERANG SELATAN	
<b>BC</b>	<b>JAWA BARAT</b>		
BC-01			BOGOR
BC-02			SUKABUMI
BC-03			CIANJUR
BC-04			BANDUNG
BC-05			GARUT
BC-06			TASIKMALAYA
BC-07			CIAMIS
BC-08			KUNINGAN
BC-09			CIREBON
BC-10			MAJALENGKA
BC-11			SUMEDANG
BC-12			INDRAMAYU
BC-13			SUBANG
BC-14			PURWAKARTA
BC-15			KARAWANG
BC-16			BEKASI
BC-17			BANDUNG BARAT
BC-18			PANGANDARAN
BC-71		BOGOR	
BC-72		SUKABUMI	
BC-73		BANDUNG	
BC-74		CIREBON	
BC-75		BEKASI	
BC-76		DEPOK	
BC-77		CIMAHI	
BC-78		TASIKMALAYA	
BC-79		BANJAR	
<b>BD</b>	<b>JAWA TENGAH</b>		
BD-01			CILACAP
BD-02			BANYUMAS
BD-03			PURBALINGGA
BD-04			BANJARNEGARA
BD-05			KEBUMEN
BD-06			PURWOREJO
BD-07			WONOSOBO
BD-08			MAGELANG
BD-09			BOYOLALI
BD-10			KLATEN
BD-11			SUKOHARJO
BD-12			WONOGIRI
BD-13			KARANGANYAR

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
BD-14			SRAGEN
BD-15			GROBOGAN
BD-16			BLORA
BD-17			REMBANG
BD-18			PATI
BD-19			KUDUS
BD-20			JEPARA
BD-21			DEMAK
BD-22			SEMARANG
BD-23			TEMANGGUNG
BD-24			KENDAL
BD-25			BATANG
BD-26			PEKALONGAN
BD-27			PEMALANG
BD-28			TEGAL
BD-29			BREBES
BD-71		MAGELANG	
BD-72		SURAKARTA	
BD-73		SALATIGA	
BD-74		SEMARANG	
BD-75		PEKALONGAN	
BD-76		TEGAL	
<b>BE</b>	<b>DI YOGYAKARTA</b>		
BE-01			KULON PROGO
BE-02			BANTUL
BE-03			GUNUNGGIDUL
BE-04			SLEMAN
BE-71		YOGYAKARTA	
<b>BF</b>	<b>JAWA TIMUR</b>		
BF-01			PACITAN
BF-02			PONOROGO
BF-03			TRENGGALEK
BF-04			TULUNGAGUNG
BF-05			BLITAR
BF-06			KEDIRI
BF-07			MALANG
BF-08			LUMAJANG
BF-09			JEMBER
BF-10			BANYUWANGI
BF-11			BONDOWOSO
BF-12			SITUBONDO
BF-13			PROBOLINGGO
BF-14			PASURUAN
BF-15			SIDOARJO
BF-16			MOJOKERTO
BF-17			JOMBANG
BF-18			NGANJUK
BF-19			MADIUN

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
BF-20			MAGETAN
BF-21			NGAWI
BF-22			BOJONEGORO
BF-23			TUBAN
BF-24			LAMONGAN
BF-25			GRESIK
BF-26			BANGKALAN
BF-27			SAMPANG
BF-28			PAMEKASAN
BF-29			SUMENEP
BF-71		KEDIRI	
BF-72		BLITAR	
BF-73		MALANG	
BF-74		PROBOLINGGO	
BF-75		PASURUAN	
BF-76		MOJOKERTO	
BF-77		MADIUN	
BF-78		SURABAYA	
BF-79		BATU	
<b>CA</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>		
CA-01			SAMBAS
CA-02			MEMPAWAH
CA-03			SANGGAU
CA-04			KETAPANG
CA-05			SINTANG
CA-06			KAPUAS HULU
CA-07			BENGGAYANG
CA-08			LANDAK
CA-09			SEKADAU
CA-10			MELAWI
CA-11			KAYONG UTARA
CA-12			KUBU RAYA
CA-71		PONTIANAK	
CA-72		SINGKAWANG	
<b>CB</b>	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		
CB-01			TANAH LAUT
CB-02			KOTABARU
CB-03			BANJAR
CB-04			BARITO KUALA
CB-05			TAPIN
CB-06			HULU SUNGAI SELATAN
CB-07			HULU SUNGAI TENGAH
CB-08			HULU SUNGAI UTARA
CB-09			TABALONG
CB-10			TANAH BUMBU
CB-11			BALANGAN

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
CB-71		BANJARMASIN	
CB-72		BANJARBARU	
<b>CC</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		
CC-01			KOTAWARINGIN BARAT
CC-02			KOTAWARINGIN TIMUR
CC-03			KAPUAS
CC-04			BARITO SELATAN
CC-05			BARITO UTARA
CC-06			KATINGAN
CC-07			SERUYAN
CC-08			SUKAMARA
CC-09			LAMANDAU
CC-10			GUNUNG MAS
CC-11			PULANG PISAU
CC-12			MURUNG RAYA
CC-13			BARITO TIMUR
CC-71		PALANGKARAYA	
<b>CD</b>	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>		
CD-01			PASER
CD-02			KUTAI KARTANEGARA
CD-03			BERAU
CD-07			KUTAI BARAT
CD-08			KUTAI TIMUR
CD-09			PENAJAM PASER UTARA
CD-11			MAHAKAM ULU
CD-71		BALIKPAPAN	
CD-72		SAMARINDA	
CD-74		BONTANG	
<b>CE</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>		
CE-01			BULUNGAN
CE-02			MALINAU
CE-03			NUNUKAN
CE-04			TANA TIDUNG
CE-71		TARAKAN	
<b>DA</b>	<b>SULAWESI UTARA</b>		
DA-01			BOLAANG MONGONDOW
DA-02			MINAHASA
DA-03			KEPULAUAN SANGIHE
DA-04			KEPULAUAN TALAUD
DA-05			MINAHASA SELATAN
DA-06			MINAHASA UTARA
DA-07			MINAHASA TENGGARA



<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
DA-08			BOLAANG MONGONDOW UTARA
DA-09			KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DA-10			BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DA-11			BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DA-71		MANADO	
DA-72		BITUNG	
DA-73		TOMOHON	
DA-74		KOTAMOBAGU	
<b>DB</b>	<b>GORONTALO</b>		
DB-01			GORONTALO
DB-02			BOALEMO
DB-03			BONE BOLANGO
DB-04			PAHUWATO
DB-05			GORONTALO UTARA
DB-71		GORONTALO	
<b>DC</b>	<b>SULAWESI TENGAH</b>		
DC-01			BANGGAI
DC-02			POSO
DC-03			DONGGALA
DC-04			TOLITOLI
DC-05			BUOL
DC-06			MOROWALI
DC-07			BANGGAI KEPULAUAN
DC-08			PARIGI MOUTONG
DC-09			TOJO UNA UNA
DC-10			SIGI
DC-11			BANGGAI LAUT
DC-12			MOROWALI UTARA
DC-71		PALU	
<b>DD</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>		
DD-01			KOLAKA
DD-02			KONAWE
DD-03			MUNA
DD-04			BUTON
DD-05			KONAWE SELATAN
DD-06			BOMBANA
DD-07			WAKATOBI
DD-08			KOLAKA UTARA
DD-09			KONAWE UTARA
DD-10			BUTON UTARA
DD-11			KOLAKA TIMUR

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
DD-12			KONAWE KEPULAUAN
DD-13			MUNA BARAT
DD-14			BUTON TENGAH
DD-15			BUTON SELATAN
DD-71		KENDARI	
DD-72		BAU BAU	
<b>DE</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>		
DE-01			KEPULAUAN SELAYAR
DE-02			BULUKUMBA
DE-03			BANTAENG
DE-04			JENEPONTO
DE-05			TAKALAR
DE-06			GOWA
DE-07			SINJAI
DE-08			BONE
DE-09			MAROS
DE-10			PANGKAJENE KEPULAUAN
DE-11			BARRU
DE-12			SOPPENG
DE-13			WAJO
DE-14			SIDENRENG RAPPANG
DE-15			PINRANG
DE-16			ENREKANG
DE-17			LUWU
DE-18			TANA TORAJA
DE-22			LUWU UTARA
DE-24			LUWU TIMUR
DE-26			TORAJA UTARA
DE-71		MAKASSAR	
DE-72		PARE PARE	
DE-73		PALOPO	
<b>DF</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>		
DF-01			MAMUJU UTARA
DF-02			MAMUJU
DF-03			MAMASA
DF-04			POLEWALI MANDAR
DF-05			MAJENE
DF-06			MAMUJU TENGAH
<b>EA</b>	<b>BALI</b>		
EA-01			JEMBRANA
EA-02			TABANAN
EA-03			BADUNG
EA-04			GIANYAR
EA-05			KLUNGKUNG
EA-06			BANGLI
EA-07			KARANGASEM

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
EA-08			BULELENG
EA-71		DENPASAR	
<b>EB</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>		
EB-01			LOMBOK BARAT
EB-02			LOMBOK TENGAH
EB-03			LOMBOK TIMUR
EB-04			SUMBAWA
EB-05			DOMPU
EB-06			BIMA
EB-07			SUMBAWA BARAT
EB-08			LOMBOK UTARA
EB-71		MATARAM	
EB-72		BIMA	
<b>EC</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>		
EC-01			KUPANG
EC-02			TIMOR TENGAH SELATAN
EC-03			TIMOR TENGAH UTARA
EC-04			BELU
EC-05			ALOR
EC-06			FLORES TIMUR
EC-07			SIKKA
EC-08			ENDE
EC-09			NGADA
EC-10			MANGGARAI
EC-11			SUMBA TIMUR
EC-12			SUMBA BARAT
EC-13			LEMBATA
EC-14			ROTE NDAO
EC-15			MANGGARAI BARAT
EC-16			NAGEKEO
EC-17			SUMBA TENGAH
EC-18			SUMBA BARAT DAYA
EC-19			MANGGARAI TIMUR
EC-20			SABU RAIJUA
EC-21			MALAKA
EC-71		KUPANG	
<b>FA</b>	<b>MALUKU</b>		
FA-01			MALUKU TENGAH
FA-02			MALUKU TENGGARA
FA-03			MALUKU TENGGARA BARAT
FA-04			BURU
FA-05			SERAM BAGIAN TIMUR
FA-06			SERAM BAGIAN BARAT
FA-07			KEPULAUAN ARU
FA-08			MALUKU BARAT DAYA

<b>KODE</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KOTA</b>	<b>KABUPATEN</b>
FA-09			BURU SELATAN
FA-71		AMBON	
FA-72		TUAL	
<b>FB</b>	<b>MALUKU UTARA</b>		
FB-01			HALMAHERA BARAT
FB-02			HALMAHERA TENGAH
FB-03			HALMAHERA UTARA
FB-04			HALMAHERA SELATAN
FB-05			KEPULAUAN SULA
FB-06			HALMAHERA TIMUR
FB-07			PULAU MOROTAI
FB-08			PULAU TALIABU
FB-71		TERNATE	
FB-72		TIDORE KEPULAUAN	
<b>GA</b>	<b>PAPUA</b>		
GA-01			MERAUKE
GA-02			JAYAWIJAYA
GA-03			JAYAPURA
GA-04			NABIRE
GA-05			KEPULAUAN YAPEN
GA-06			BIAK NUMFOR
GA-07			PUNCAK JAYA
GA-08			PANIAI
GA-09			MIMIKA
GA-10			SARMI
GA-11			KEEROM
GA-12			PEGUNUNGAN BINTANG
GA-13			YAHUKIMO
GA-14			TOLIKARA
GA-15			WAROPEN
GA-16			BOVEN DIGOEL
GA-17			MAPPI
GA-18			ASMAT
GA-19			SUPIORI
GA-20			MAMBERAMO RAYA
GA-21			MAMBERAMO TENGAH
GA-22			YALIMO
GA-23			LANNY JAYA
GA-24			NDUGA
GA-25			PUNCAK
GA-26			DOGIYAI
GA-27			INTAN JAYA
GA-28			DEIYAI
GA-71		JAYAPURA	
<b>GB</b>	<b>PAPUA BARAT</b>		
GB-01			SORONG
GB-02			MANOKWARI

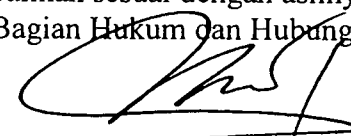
KODE	PROVINSI	KOTA	KABUPATEN
GB-03			FAKFAK
GB-04			SORONG SELATAN
GB-05			RAJA AMPAT
GB-06			TELUK BINTUNI
GB-07			TELUK WONDAMA
GB-08			KAIMANA
GB-09			TAMBRAUW
GB-10			MAYBRAT
GB-11			MANOKWARI SELATAN
GB-12			PEGUNUNGAN ARFAK
GB-71		SORONG	

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

**Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.**  
**Pembina Utama (IV/e)**  
**NIP. 19590824 201603 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat



**NASUTION BIN AS**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19680223 199803 1 002**

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.1472/AJ.402/DRJD/2017  
Tanggal : 30 Maret 2017

**A. BENTUK DAN UKURAN NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**AA-01-A-16-000001**

**Keterangan:**

I. Plat

Bahan : Aluminium  
Dimensi : Panjang x Lebar (100 mm x 20 mm)  
Tebal : 0,9 mm

II. *Stamping*

Cetak : *Emboss*  
Jenis huruf : *Arial*  
Ukuran : 20

**B. CONTOH PENULISAN NOMOR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**AA-01-A-16-000001**

**Keterangan:**

AA : untuk Provinsi Aceh;  
01 : untuk Kabupaten Aceh Selatan;  
A : untuk Mobil Penumpang umum;  
16 : untuk tahun pendaftaran uji berkala 2016; dan  
000001 : untuk nomor urut uji 1

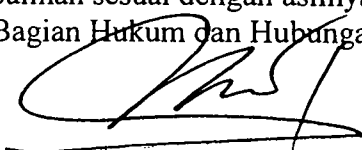
---

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

**Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.**  
**Pembina Utama (IV/e)**  
**NIP. 19590824 201603 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat



**NASUTION BIN AS**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19680223 199803 1 002**